

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemacetan lalu lintas sering menjadi topik utama yang selalu menjadi permasalahan dalam dunia transportasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum ada tiga faktor penyebab kemacetan yang memperparah, yaitu dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi yang belum merata, serta pengoperasian fasilitas transportasi yang belum optimal. Kemacetan sendiri sudah menjadi hal yang menarik untuk dikaji, seperti halnya kemacetan yang diakibatkan oleh adanya pengaruh aktifitas perdagangan pada area pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian di Kabupaten Pacitan yang mempunyai tingkat aktivitas perjalanan yang tinggi sehingga pada ruas jalan di kawasan ini memiliki volume lalu lintas yang tinggi.

Permasalahan lalu lintas saat ini sudah banyak dirasakan oleh para pengguna jalan. Selain permasalahan penyediaan prasarana jalan yang tidak sebanding dengan penambahan kendaraan, juga permasalahan banyaknya aktivitas selain lalu lintas yang menggunakan badan jalan, dan faktor hambatan samping juga menjadi salah satu kendala karena banyaknya aktivitas perdagangan pada beberapa ruas jalan yang dilintasi kendaraan.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Pacitan mempunyai jalan lintas utama salah satunya yaitu jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Pacitan dengan 2 kota lainnya yaitu Solo dan Jogja. Jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII berada di tengah – tengah Terminal Tipe C dan juga Pasar Punung, oleh karena itu pada ruas jalan ini sering terjadi kepadatan jumlah kendaraan yang ditambah dengan hambatan samping seperti keluar masuknya kendaraan di pasar dan juga terminal, pedagang kaki lima yang berjualan

di bahu jalan, bus yang berhenti di badan jalan yang tepat di depan pasar untuk menaikan dan menurunkan penumpang, pejalan kaki yang menggunakan bahu jalan yang dapat mengganggu laju kendaraan, serta kendaraan yang parkir liar di bahu jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Maka dari itu peneliti menjadikan ruas jalan pada area pasar punung dan juga terminal punung menjadi wilayah studi karena ruas jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII juga merupakan ruas jalan dengan kinerja terburuk yang memiliki permasalahan seperti Derajat Kejenuhan 0,68 dan tingkat pelayanan jalan di ambil dari kecepatan kendaraan di segmen VIII ruas jalan dengan kecepatan 36,51 Km/jam , dan juga untuk jam operasi pasar dimulai pada pukul 06.00 – 12.00, dan pasar beroperasi tidak setiap hari, dikarenakan pasaran untuk di kabupaten Pacitan mengikuti kalender Jawa sehingga Pasar Margo Mulyo Punung di kabupaten Pacitan ini hanya beroperasi pada saat hari Pahing.

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Perlu dilakukan studi mengenai penataan lalu lintas pada ruas jalan tersebut sebagai bahan kajian untuk pengaturan lalu lintas guna menunjang kinerja jaringan jalan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu penulis mengambil judul "**OPTIMALISASI KINERJA LALU LINTAS DI RUAS JALAN GLONGGONG - BATAS KOTA PACITAN VIII**". Diharapkan dengan adanya pengoptimalan kinerja ruas jalan di Pasar dan Terminal Punung dapat mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada, mengoptimalkan efisiensi pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi, serta menyeimbangkan permintaan terhadap prasarana yang ada.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada pada wilayah studi dan juga latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan parkir sembarangan di bahu jalan pada ruas jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII sehingga mempengaruhi kinerja ruas jalan pada area pasar dan juga terminal.
2. Adanya pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapak di bahu jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan menurunnya kinerja ruas jalan.
3. Tidak adanya fasilitas untuk pejalan kaki yang memadai menyebabkan konflik lalu lintas dan beresiko terhadap keselamatan pejalan kaki pada area pasar dan juga terminal, dan juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas di ruas tersebut.
4. Lebar efektif jalan berkurang diakibatkan adanya bus AKAP dan AKDP yang menggunakan badan jalan untuk berhenti menunggu dan menaikkan ataupun menurunkan penumpang.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kondisi eksisting kinerja lalu lintas pada ruas jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII ?
2. Bagaimana usulan untuk pemecahan permasalahan yang ada terhadap kondisi eksisting pada ruas Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII ?
3. Bagaimana perbedaan kondisi eksisting kinerja lalu lintas sebelum dan sesudah dilakukan usulan pemecahan masalah pada ruas jalan tersebut ?

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk mengkaji dan memberikan usulan untuk mengatasi permasalahan kinerja lalu lintas ruas jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII.

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menganalisis kondisi eksisting kinerja lalu lintas, kondisi eksisting parkir, dan fasilitas pejalan kaki di ruas Jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII .
2. Melakukan usulan terbaik terhadap kondisi eksisting di ruas Jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII.
3. Membandingkan kinerja lalu lintas sebelum dan sesudah usulan untuk pemecahan permasalahan.

## **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penulisan ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengumpulan data, analisis, dan pengolahan data lebih lanjut.

Batasan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian difokuskan pada pengoptimalan kinerja ruas jalan di Jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII.
2. Kajian hanya mencakup kinerja ruas jalan, analisis kebutuhan fasilitas pejalan kaki menyusuri maupun menyebrang, serta analisis parkir di ruas Jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII khususnya pada area pasar dan terminal punung.
3. Analisis dan kajian tidak menghitung biaya perencanaan, pengadaan dan pemasangan prasarana yang dibutuhkan